

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Otonomi di Persimpangan: Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendidikan

The Indonesia Forum Seri 138 | 24 November 2026

Felia Primaresti
Research and Program Manager
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Pendidikan Urusan Daerah, Tetapi Dananya Banyak Diputuskan di Pusat

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

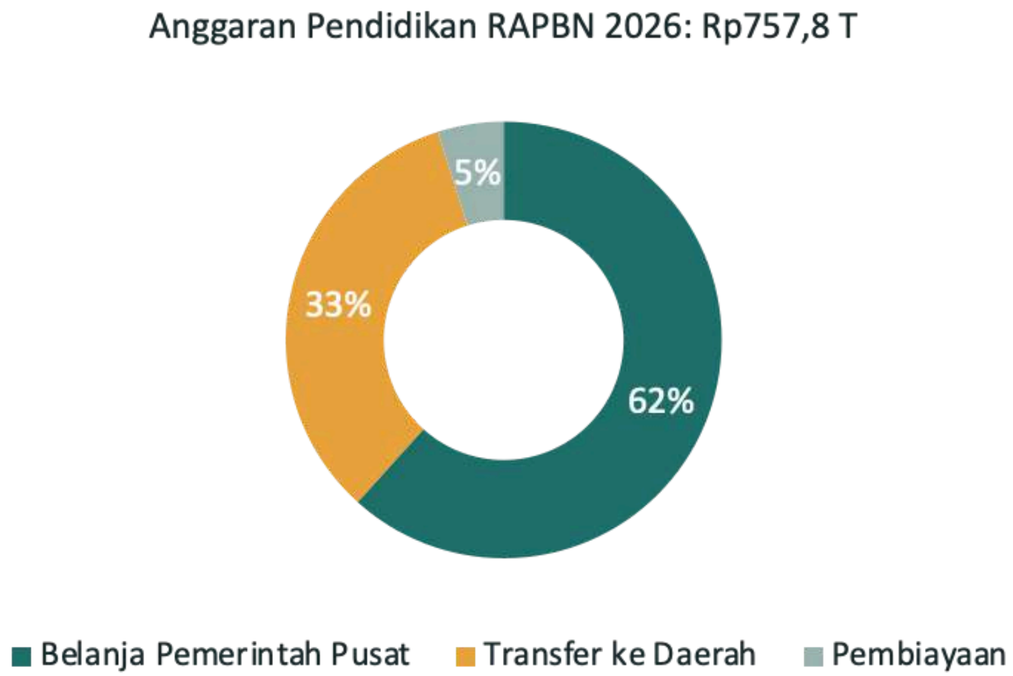

Rp253,4 T

Lewat Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan tunjangan guru.

Daerah menjalankan urusan pendidikan, tetapi sebagian besar dananya diputuskan di pusat.

Isi Transfer Pendidikan: Bantuan Operasional Dan Tunjangan Guru

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

43,5 juta

Jumlah siswa penerima BOS lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik

6,2 juta

Jumlah peserta didik penerima BOS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

894,8 ribu

Jumlah peserta didik penerima BOS Kesetaraan

Rp69 T

Jumlah nominal Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil (TPG ASN) Daerah untuk 1,6 juta guru

65,9 ribu

Jumlah guru penerima Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah

22,7 ribu

Jumlah guru penerima Tambahan Penghasilan ASN Daerah

Sumber: Indonesia Report 2026 (Tabel 3), bagian dari TKD pendidikan Rp253,36 T

Ruang Gerak Daerah Sempit:

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

±27%

TPG ASN Daerah (Rp69 T) saja setara sekitar seperempat TKD pendidikan Rp253,4 T*

DAK Nonfisik

BOS, BOS PAUD, dan BOS Kesetaraan: peruntukannya sudah ditentukan dari pusat

Gaji ASN

Menyerap porsi besar belanja pendidikan daerah; pelatihan guru, beasiswa, operasional terbatas

Bergantung Transfer

Belanja daerah sangat bergantung pada pusat; program pusat belum tentu sesuai kebutuhan lokal

Hasilnya: ruang diskresi daerah untuk merespons kebutuhan lokal relatif sempit

Di Saat Yang Sama, Porsi TKD Terhadap Belanja Negara Terus Menyusut

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

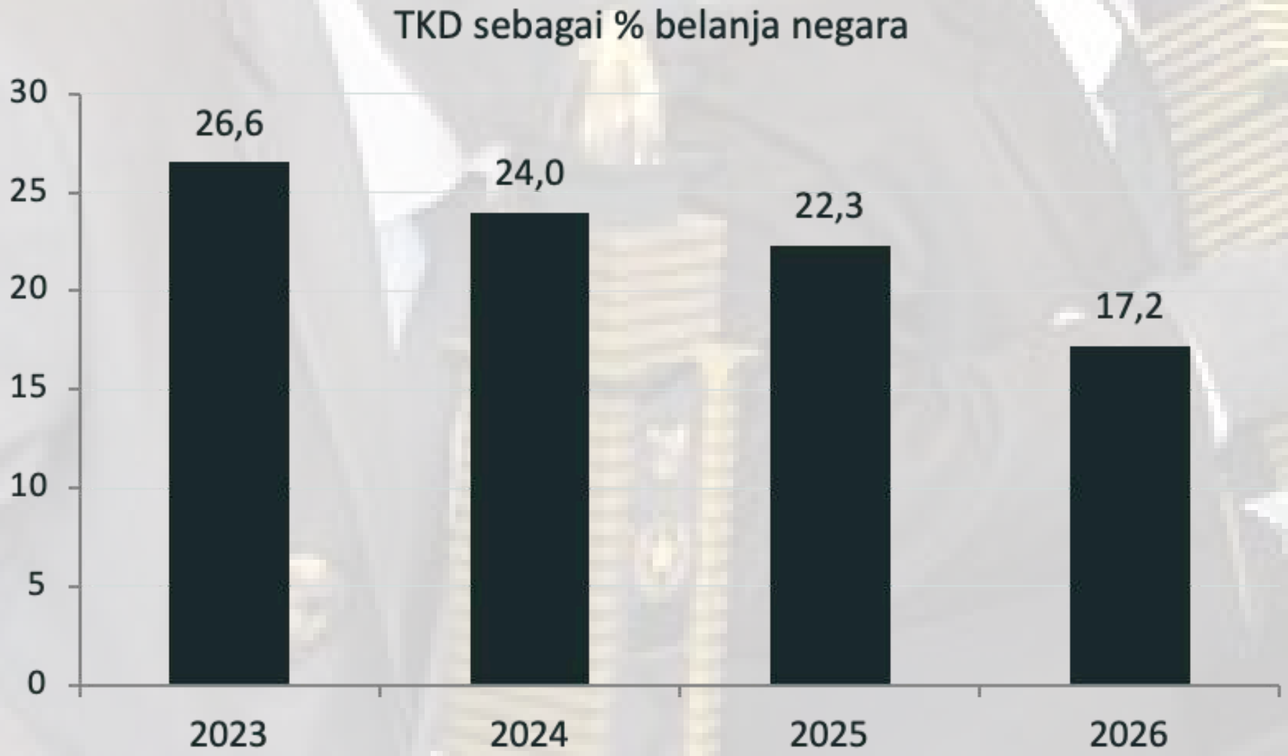

Postur Anggaran vs TKD

2023: 3061,2 T vs Rp813,1 T

2024: 3325,1 vs Rp798 T

2025: 3621,3 vs Rp807,9 T

2026: 3842,7 vs Rp661,7 T*

*Bloomberg Technoz: Rp727,2 T (18,92%)

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Kebutuhan Tiap Daerah Berbeda, Kebijakan Seragam Tidak Cukup

99,74% vs 80,13%

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun: Riau vs Papua Tengah

99,60% vs 67,86%

APS usia 13-15 tahun: DI Yogyakarta vs Papua Tengah

54,72% vs 12,48%

APS usia 19-23 tahun: DI Yogyakarta vs Papua Pegunungan

Butuh penguatan berbeda di tiap daerah dalam aspek *Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability* (4A)

Seluruh TKD Pendidikan Lebih Kecil Dari Satu Program Pusat

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Rp253,4 T

Seluruh TKD pendidikan untuk semua daerah mencakup BOS, BOP PAUD, tunjangan guru,dan lain-lain.

Rp268 T

Satu program pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG), sekitar 35,4% dari anggaran pendidikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Putusan MK 40/PUU-XXIV/2026 (30 Juli 2026): MBG yang bukan komponen utama pendidikan dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan, paling lambat APBN 2028.

Anggaran Besar Tidak Otomatis Hasil Belajar Lebih Baik

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

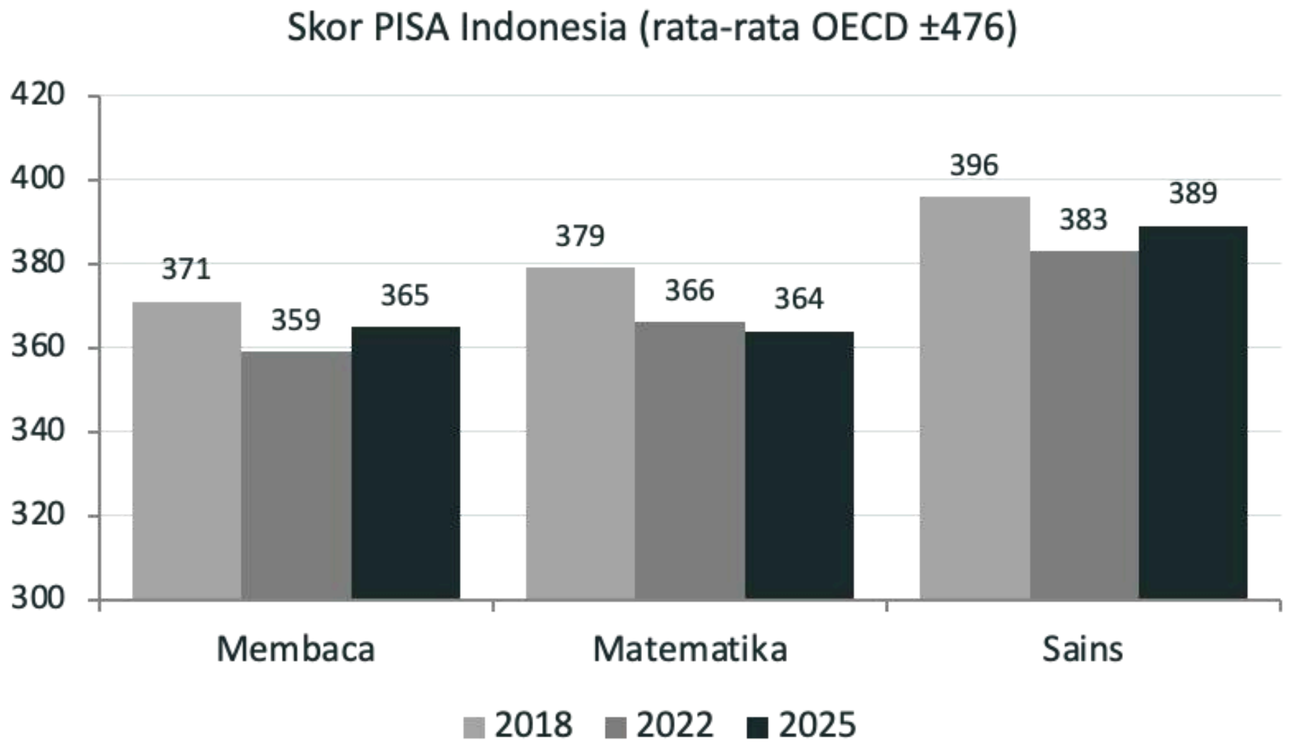

93,03% vs 44,61%

APS usia 16-18 tahun: DI Yogyakarta vs Papua Tengah

77,86% → 29,13%

APS nasional usia 16-18 tahun ke 19-23 tahun

Anggaran Besar Tidak Otomatis Hasil Belajar Lebih Baik

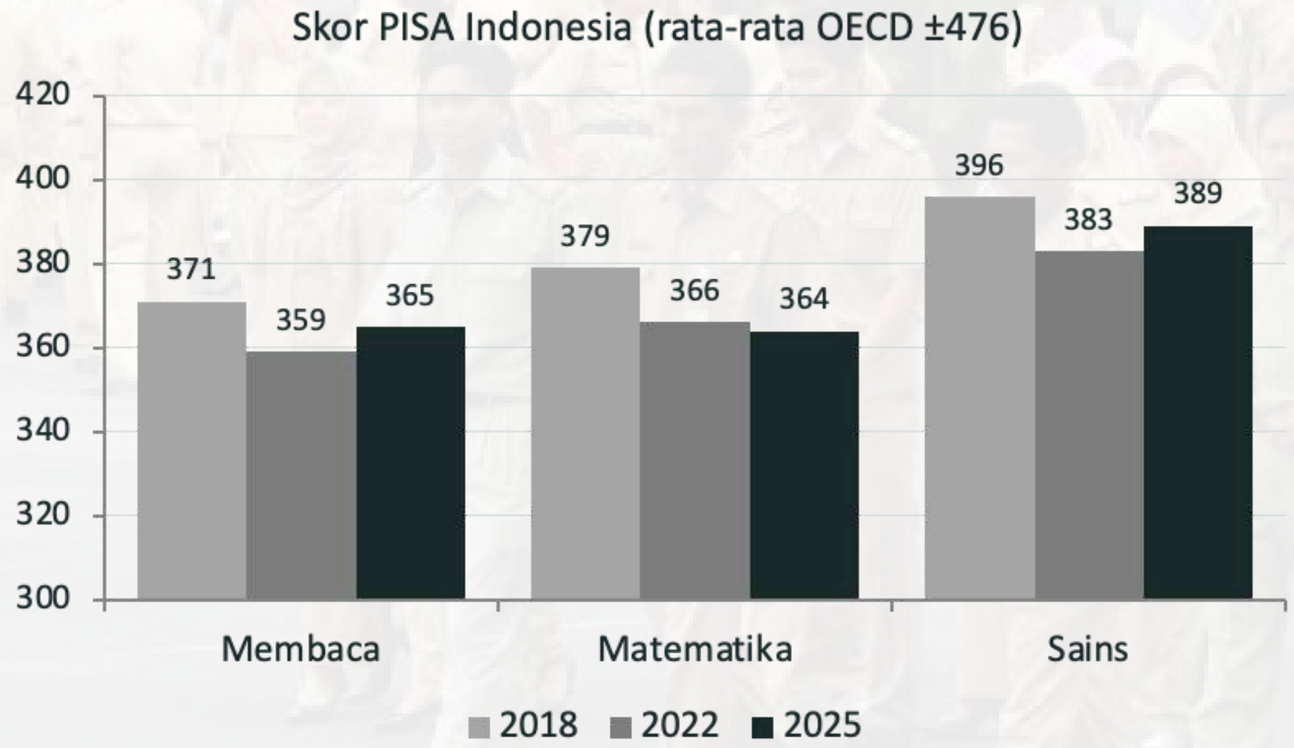

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

93,03% vs 44,61%

APS usia 16-18 tahun: DI Yogyakarta vs Papua Tengah

77,86% → 29,13%

APS nasional usia 16-18 tahun ke 19-23 tahun

Yang Perlu Didorong: Ruang Gerak Daerah dan KeterlacakanAnggaran

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Fleksibilitas Bagi Daerah

Pemerintah pusat (Kemenkeu, Bappenas, K/L teknis): merancang kebijakan anggaran yang afirmatif dan berbasis kebutuhan wilayah, bukan seragam, serta memberi daerah ruang mengalokasikan sesuai prioritas.

Keterlacakan Anggaran

Kemenkeu bersama Bappenas, Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek: memperkuat klasifikasi dan penandaan anggaran (*budget tagging*) supaya belanja yang dihitung sebagai anggaran pendidikan benar-benar berkaitan dengan layanan pendidikan.

Kapasitas Perencanaan Daerah

Pemerintah daerah: menyelaraskan perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan dengan sumber daya, kapasitas, kebutuhan satuan pendidikan, dan karakter wilayah. Juga mengevaluasi pemerataan distribusi guru dan kondisi kerja, serta memastikan ketepatan sasaran BOS dan PIP bersama Kemendikdasmen.



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)
Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

Twitter : @the_indonesian
Instagram : @indonesian.institute
FB : Tii Jakarta
YouTube : The indonesian institute